

**KEPEDULIAN MASYARAKAT PESISIR KARIMUNJAWA  
TERHADAP MASALAH PENCEMARAN**

Oleh :

Sardiyatmo

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2005**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul : Kepedulian Masyarakat Pesisir Karimunjawa Terhadap Masalah Pencemaran

Peneliti : Sardiyatmo

Mengetahui,



Dekan FPIK - UNDIP

Drs. Johannes Hutabarat, M.Sc.

130529700

Semarang, Oktober 2005

Peneliti

Drs. Sardiyatmo, M.Si

NIP. 131 626 758

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 402/KI/FPIK/01
Tgl. : 17/5.06

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara yang telah membantu memberikan data – data.
2. Balai Taman Nasional Karimunjawa tentang rencana pengelolaan wilayah.
3. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, atas dorongan sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Oktober 2005

Penyusun

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	3
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	7
IV. METODE PENELITIAN .....	8
V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	10
VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	14
DAFTAR PUSTAKA .....	15

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Distribusi Pekerjaan Penduduk Produktif di P.Karimunjawa .....	11
Tabel 2. Distribusi Pendidikan Masyarakat Usia Sekolah .....	11

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian :

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Canada. Sebagian besar masyarakat pantai memiliki tingkat pendapat dan derajat kesejahteraan yang rendah. Hal ini merupakan ancaman bagi kualitas lingkungan pesisir.

Pembangunan wilayah pesisir dapat menimbulkan berbagai macam dampak terhadap kualitas lingkungan. Beberapa dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi wilayah pesisir juga dapat menyebabkan adanya kerusakan lingkungan dan pencemaran. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di daerah pesisir dan karena banyaknya kegiatan manusia, baik di daerah pesisir maupun di pedalaman yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelestarian fungsi dari ekosistem wilayah pesisir. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kegiatan para pengguna sumberdaya di wilayah pesisir perlu diarahkan sehingga mereka sadar akan nilai pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya wilayah pesisir.

Beberapa hal penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir antara lain adalah : pemanfaatan sumberdaya yang berlebih, pengembangan areal pemukiman dan pertambakan, penambangan pasir pantai dan pembangunan wilayah pesisir untuk keperluan konstruksi pelabuhan, industri dan pariwisata.

Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang lemah dan pertumbuhan penduduk yang pesat menuntut adanya pemenuhan kebutuhan yang lebih besar, sehingga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada secara berlebih yang akhirnya akan mengganggu keseimbangan fungsi dan kelestarian dari sumberdaya wilayah pesisir.

Untuk menghindari adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir lebih lanjut dan dengan tidak mengurangi manfaat yang bisa diambil, maka pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem wilayah pesisir perlu

ditingkatkan. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap masalah pencemaran wilayah pesisir merupakan salah satu strategi dalam pembangunan lingkungan yang lestari. Salah satu cara peningkatan kepedulian tersebut adalah dengan melakukan pendidikan cinta lingkungan, sehingga masyarakat akan merasa memiliki untuk ikut menjaga kelestarian fungsi ekosistem wilayah pesisir.

## **2. Perumusan Masalah**

Sampai saat ini masih banyak ditemui masalah pencemaran wilayah pesisir. Agar kelestarian sumberdaya wilayah pesisir tidak terancam, maka tingkat kepedulian masyarakat pengguna sumberdaya terhadap masalah di wilayah pesisir perlu ditingkatkan.

Penduduk setempat cenderung melihat keuntungan dari suatu pembangunan wilayah pesisir adalah merupakan keuntungan pihak yang terkait, oleh karenanya mereka merasa tidak ikut memiliki sehingga juga tidak ikut menjaga kelestariannya. Untuk itu maka perlu dikenalkan wawasan pembangunan berkelanjutan agar mereka dapat menikmati pemanfaatan sumberdaya yang ada secara lestari.

Selain dari pada itu pemanfaatan potensi sumberdaya Alam lokal serta kemandirian masyarakat pesisir dalam mengelola lingkungan menjadi faktor dominan yang perlu mendapat perhatian, sehingga mereka mampu memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal yang ada secara optimal dan memberikan kontribusi ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dan demografi disuatu kepulauan akan memberikan konsekuensi terhadap masalah lingkungan, overfishing, destructive fishing dan pengrusakan mangrove bagi aktivitas aquaculture. Peningkatan limbah industri serta penurunan kualitas kesehatan masyarakat.

Pengelolaan lingkungan harus direncanakan secara lokal, regional dan global untuk peningkatan kondisi kualitas dan kuantitas sumberdaya alam serta mengurangi resiko ekonomi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pencemaran

Kegiatan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk akan selalu membawa dampak terhadap lingkungan. Agar dampak tersebut tidak mengurangi fungsi dan kelestarian sumberdaya, maka pembangunan/pemanfaatan sumberdaya harus dilakukan secara terencana, rasional dan optimal dengan memperhatikan daya dukung lingkungannya.

Tuntutan kebutuhan manusia yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk telah menyebabkan berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan lokal yang akhirnya mengakibatkan dampak global (Coutrier, 1993).

Peningkatan jumlah penduduk beserta aktivitasnya pada umumnya memberikan beban polusi terhadap lingkungan, dimana beban ini makin lama makin bertambah. Sumber pencemaran ini menghasilkan aneka bahan pencemar, seperti sampah domestik, sampah kota, detergen, minyak oli, dll. Tanpa adanya sarana teknik di lingkungan pemukiman untuk menanggulangi masalah beban polusi ini, maka kelestarian lingkungan akan terganggu.

Penanggulangan masalah pencemaran dari daerah pemukiman ini dapat dilaksanakan dengan cara menyediakan sarana tempat pembuangan dan teknik pengolahan limbah, serta dengan memanfaatkan air buangan yang kaya dengan bahan organik itu untuk budidaya ikan.

Agar pembangunan dapat berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak lingkungan, Coutrier (1993) mengenalkan prinsip 5 R dalam pembangunan, yaitu reduce waste, reuse resource, recycle waste, replenish resource dan repair resource.

Dampak dari penggunaan sumber daya dapat dilihat dari kualitas lingkungannya, ekonomi, estetika dan kenyamanan pemakai.

Komposisi limbah yang berasal dari pemukiman, kegiatan industri dll dapat berupa cair atau padat. Pada umumnya limbah dibuang ke alam (tanah, air, dibakar), ditampung atau diolah untuk kemudian digunakan kembali (sebagai pupuk, pengairan)

Dalam UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Purnomohadi, 1998).

Pencegahan pencemaran tidak selalu tergantung pada perlakuan dan pengendalian zat buangan, tetapi juga tergantung pada monitoring secara efisien dari lingkungan secara umum. Sehingga setiap saat kita mengetahui secara pasti kualitas lingkungan tersebut, untuk selanjutnya akan dapat diambil langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam pengendalian lebih lanjut.

Adanya pencemaran terhadap badan air akan dapat mengubah struktur ekosistem dan dapat mengurangi jumlah species dalam komunitas, sehingga keanekaragaman dalam ekosistem tersebut menjadi berkurang

### **Wilayah Pesisir**

Indonesia sebagai negara kepulauan (17.508 pulau) mempunyai garis pantai sepanjang 81.000 km, maka lingkungan pantai dan pesisir mempunyai fungsi penting bagi penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di daerah pesisir. Namun demikian, pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berlebihan (overuse) sudah mengakibatkan penurunan sumberdaya dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu maka pemanfaatan sumberdaya haruslah dikelola berdasarkan wawasan lingkungan agar pembangunan wilayah pesisir dapat berkelanjutan.

Pengelolaan wilayah pesisir merupakan aktivitas kompleks yang tidak hanya melibatkan banyak sektor dari masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelestarian dari sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Untuk itu maka perlu

informasi dan masukan dari para pengguna sumberdaya, perencana dan profesional serta pembuat kebijakan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan salah satu masalah besar dalam pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini terjadi karena masyarakat pada umumnya kurang peduli terhadap lingkungannya. Untuk itu maka tingkat kepedulian masyarakat terhadap masalah pencemaran perlu ditingkatkan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana tiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu peran serta masyarakat dalam pengelolaan (pemberdayaan masyarakat) mulai dikenalkan dan sudah menampakkan hasil yang positif (Purnomohadi, 1998).

Secara dominan wilayah pesisir memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan sumberdaya alam hayati berupa mangrove, coral reefs, sea weed maupun habitat pantai lainnya. Disamping itu juga memberikan kontribusi terhadap sumberdaya alam Non hayati berupa sand, reef and gravel.

### **Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan**

Salah satu fungsi yang menjadi strategi pembangunan lingkungan nasional berkelanjutan adalah pembangunan dan peningkatan kesadaran dan kepedulian manusia Indonesia akan perlunya melestarikan fungsi lingkungan dengan lebih berdasarkan pada filosofi "bottom-up"(Purnomohadi, 1998). Hal ini berarti bahwa masyarakat pengguna sebagai lapisan bawah perlu dilibatkan dalam upaya pengelolaan sumberdaya, agar mereka tidak saja hanya memanfaatkan sumberdaya tetapi juga merasa memiliki sehingga ikut menjaga kelestarian sumberdaya tersebut.

Peningkatan peran serta masyarakat melalui peningkatan pendidikan kesadaran lingkungan perlu disebar-luaskan, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat secara pro-aktif ikut mengelola lingkungan. Upaya tersebut tidak akan berjalan baik jika masyarakat tidak mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya. Selain itu kemampuan masyarakat untuk ikut

menjaga lingkungannya juga berbeda-beda karena perbedaan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan teknologi.

Menurut Paul (1988) dalam M.S. Ali (1993), tujuan dari pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan adalah untuk :

- a. meningkatkan kemampuan, kesadaran masyarakat sehingga mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan.
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mampu mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan proyek pembangunan.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek.
- d. Meringankan biaya proyek melalui kontribusi masyarakat.
- e. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bisa mandiri dan mau memberikan dukungan dalam proyek.
- f. Menjamin terlaksananya keberlanjutan proyek (Sustainable).

Sejak tahun 1986 kawasan kepulauan Karimunjawa ditetapkan menjadi taman nasional laut yang terbesar keempat di Indonesia (111.625 hektar), Karimunjawa mempunyai potensi sumber daya alam yang perlu dilindungi. Pengelolaannya ada dibawah koordinasi Balai Taman Nasional Karimunjawa, meskipun demikian belum ada pengelolaan yang nyata untuk mencapai tujuan konservasi. Bahkan beberapa aktivitas yang ada telah menurunkan produktivitas ekosistem (Dutton, et al, 1993).

### **III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **Tujuan Penelitian :**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui persepsi masyarakat pengguna tentang pencemaran wilayah pesisir.
2. Mengetahui tingkat kepedulian masyarakat terhadap masalah pencemaran di wilayah pesisir Karimunjawa
3. Menganalisa masalah pencemaran yang ada dan mencari alternatif pemecahan masalahnya untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya yang lestari.

#### **Manfaat Penelitian :**

Dari penelitian ini diharapkan tingkat kepedulian masyarakat pengguna akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya wilayah pesisir meningkat. Sedangkan hasilnya nanti dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Sehingga masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir.

## IV. METODE PENELITIAN

### 1. Metodologi Penelitian :

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah persepsi masyarakat Karimunjawa, baik penduduk lokal maupun pendatang dan pengunjung (wisatawan) yang dijumpai di lokasi penelitian terhadap masalah pencemaran lingkungan.

Jumlah sampel yang dijadikan obyek penelitian sebanyak 50 responden yang diambil dari tokoh masyarakat formal dan Non formal, masyarakat nelayan serta wisatawan.

### 2. Metoda Penelitian :

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana metode yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dan survey ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada di lapangan dengan menyebarkan kuesioner.

Studi literatur dilakukan terhadap semua kegiatan dan masalah yang berhubungan dengan pencemaran di Kepulauan Karimunjawa. Selain itu juga dilakukan konsultasi dengan instansi terkait, antara lain Bappeda, KSDA, Balai Taman Nasional Karimunjawa dan Dinas Pariwisata untuk mendapatkan masukan mengenai rencana pembangunan dan pengelolaan yang sudah dan akan diterapkan untuk Karimunjawa.

Survey lapangan dilaksanakan pada bulan Juli 2005 di Kelurahan Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara disertai dengan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna wilayah pesisir, baik penduduk setempat maupun pengunjung. Hal ini ditujukan untuk melihat profil dan persepsi masyarakat terhadap masalah pencemaran di wilayah pesisir Karimunjawa. Kuesioner disusun secara teratur sehingga responden dapat memberikan jawabannya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Agar dapat mewakili populasi yang ada, maka jumlah kuesioner yang disebar dihitung dari jumlah penduduk dan jumlah pengunjung yang ada.

### **3. Analisa Data**

Dari hasil data yang dikumpulkan, kemudian dianalisa untuk melihat tingkat kepedulian mereka terhadap masalah pencemaran dan dapat mencari alternatif pemecahan masalahnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam rencana pembangunan dan pengelolaan yang akan datang.

Analisa data meliputi kajian persepsi masyarakat terhadap lingkungan, respon masyarakat terhadap lingkungan, serta tindakan dan rencana tindakan yang akan diambil oleh masyarakat.

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Karakteristik Daerah Penelitian**

Kepulauan Karimunjawa secara administratif merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara, terletak sekitar 50 mil di sebelah utara kota Semarang. Luas wilayah kepulauan ini adalah 107.225 hektar dengan luas wilayah daratan 7.120 hektar yang tersebar di 27 pulau. Jarak antar pulau hanya dapat ditempuh melalui laut, kecuali untuk pulau Karimunjawa dan Kemujan yang sudah mempunyai jalan penghubung lewat darat.

Sebagai kepulauan, Karimunjawa dapat dijangkau melalui jalan air, yaitu dari Pantai Kartini Jepara, dengan menggunakan feri setiap hari Rabu dan Sabtu dan melalui udara dengan cara mencarter pesawat dari Bandara A. Yani Semarang. Sedangkan untuk menghubungkan transportasi antar pulau di Kepulauan Karimunjawa menggunakan sarana perahu motor.

### **Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk**

Jumlah penduduk seluruhnya 7.305 jiwa yang berasal dari suku Jawa, Madura dan Bugis, yang mendiami 5 pulau. Sebagian besar penduduk beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Pola pemukiman penduduk pada umumnya bersifat mengelompok.

Masyarakat Karimunjawa pada umumnya berpendidikan Sekolah Dasar dengan tingkat pendapatan yang kecil, disamping itu kesadaran penduduk terhadap kehidupan masa depan yang berkaitan dengan masalah lingkungan masih kurang.

### **Kegiatan Ekonomi**

Kegiatan ekonomi masyarakat Karimunjawa selain aktivitas utama sebagai nelayan juga bergerak dalam penyediaan losmen wisata, serta aktivitas pariwisata lainnya, Sedangkan pemanfaatan pulau-pulau disekitar P.Karimunjawa, oleh masyarakat ditanami pohon Kelapa serta dimanfaatkan sebagai areal tambak udang. Salah satu pulau (Kura-kura Resort) disewakan kepada Investor dan dipergunakan sebagai Kawasan wisata laut.

Jumlah Penduduk produktif di Pulau Karimunjawa sebanyak 2578 jiwa dengan distribusi pekerjaan sebagai berikut :

**Tabel 1. Distribusi Pekerjaan Penduduk Produktif di P. Karimunjawa**

No	Mata Pencaharian	Orang
1	Karyawan	83
2	Wiraswasta	106
3	Tani	564
4	Pertukangan	33
5	Buruh tani	174
6	Pensiun	5
7	Nelayan	1590
8	Jasa	23

Pulau Karimunjawa terdapat sebuah Koperasi Unit Desa Mina (KUD-Mina) yang diberi nama KUD Minoroso Sejati yang memberikan pelayanan terhadap berbagai kebutuhan Nelayan. Selain itu juga terdapat sebuah unit Badan Kredit Kecamatan (BKK) serta dua buah koperasi Simpan Pinjam yang melayani kebutuhan penduduk.

Aktivitas ekonomi yang berupa Jasa Pariwisata terdapat 12 rumah tinggal wisata (losmen) , 5 buah warung makan serta 36 angkutan motor roda dua.

Di Kepulauan Karimunjawa terdapat dua Sekolah Dasar, sebuah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sebuah Pondok Pesantren. Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi hanya bisa dilakukan diluar Pulau Karimunjawa.

Distribusi Pendidikan masyarakat usia sekolah di Pulau Karimunjawa terlihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Distribusi Pendidikan Masyarakat Usia Sekolah**

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	80
2	SD	600
3	SMP	48
4	PESANTREN	161

## **2. Kualitas Lingkungan**

Secara umum kualitas lingkungan wilayah pesisir Karimunjawa cukup bagus, hanya pada beberapa tempat masih dapat dijumpai adanya sampah organik, terutama di sekitar pemukiman penduduk.

Pada umumnya, sampah domestik dari penduduk setempat dikumpulkan untuk kemudian ditimbun dalam tanah atau dibakar. Di beberapa lokasi di pinggir pantai, khususnya di pantai Barat Daya, banyak ditemukan reklamasi pantai dari timbunan batu dan sampah, sehingga garis pantai menjadi semakin menjorok ke laut.

Di daerah Kepulauan Karimunjawa sebagai Taman Nasional wajib dilindungi habitat biotik yang ada didalamnya sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Pengelolaan kawasan Taman Nasional tersebut harus memperhatikan pembagian kawasan yaitu : kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya dan kawasan non budidaya.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang memerlukan perlindungan dari segala bentuk aktivitas manusia, sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang diperbolehkan untuk aktivitas budidaya termasuk untuk pemukiman. Sedang kawasan penyangga adalah wilayah yang dapat berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya terbatas. Pengaturan kawasan ini sebagai upaya efisiensi penataan kawasan serta mencegah penggunaan lahan secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Masalah pencemaran yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan Karimunjawa berkaitan dengan pengambilan terumbu karang sebagai bahan bangunan, adanya limbah plastik yang berasal dari masyarakat dan wisatawan, pembuatan areal tambak yang kurang tepat serta pengambilan ikan karang konsumsi / ikan karang hias dengan menggunakan bahan peledak.

Alternatif pemecahan masalah telah dilakukan dengan berbagai penyuluhan lingkungan atas partisipasi Taman Nasional serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat yang dilakukan secara rutin (berkala) ke sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat.

Dengan adanya bantuan teknik pembuatan Batako dari pemerintah mampu memberikan bermanfaat mengurangi pengrusakan terumbu karang sebagai bahan baku bangunan.

Dari hasil analisa data dari responden diperoleh bahwa anggapan masyarakat Pulau Karimunjawa terhadap kondisi lingkungannya adalah 62 % beranggapan sudah baik, 32 % beranggapan masih perlu diperbaiki dan 6 % mengaku tidak tahu. Selain itu masalah partisipasi masyarakat terhadap lingkungan adalah 70 % aktif berpartisipasi, 23 % kurang peduli dan 7 % tidak pernah memikirkan masalah lingkungan (tidak peduli).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi masyarakat Karimunjawa tentang pencemaran masih terbatas pada anggapan adanya gangguan terhadap kehidupan mereka, hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan masyarakat pada umumnya masih tergolong rendah diaman mereka menganggap bahwa selama kenyamanan hidup mereka tidak terganggu, pencemaran lingkungan belum merupakan ancaman.
2. Tingkat kepedualian masyarakat terhadap masalah pencemaran di wilayah pesisir sudah cukup tinggi (70%), walaupun di beberapa tempat masih ada yang tidak peduli (7%). Hal ini kemungkinan karena mereka belum begitu mengerti tentang adanya kemungkinan masalah pencemaran yang akan timbul dari akumulasi hasil sampah mereka yang dibuat untuk reklamasi pantai.

### 2. Saran

Untuk lebih meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat pengguna sumberdaya wilayah pesisir, maka keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan awal sampai monitoring perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat setempat tidak hanya merasa dijadikan obyek saja tetapi perlu diajak secara proaktif untuk menjaga kelestarian dan kualitas sumberdaya yang menjadi aset pengembangan daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Saleh. 1993. partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Berkelanjutan. Kursus Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan. 20 September – 9 Oktober 1993.
- Coutrier, P.L. 1993. Analisis mengenai Dampak Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan. Kursus Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan. 20 September – 9 Oktober 1993.
- Dutton, I.M., Allison, W., and B. Ludvianto. 1993. A Preliminary Survey of the Karimunjawa Islands. UNDIP Marine Science Education Project. Semarang.
- Istanto, D.M. 1998. Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa, kaitannya dengan Pengembangan Kepulauan Karimunjawa. Lokakarya Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. Pulau Matahari, 8 – 10 Desember 1998.
- Lilley, G.R. 1997. Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Laut. Seminar Impact of Development in the Coastal Zone on Environmental Quality and Human Health. PPLH UNDIP, 14 Oktober 1997.
- Martoyo, I.D. 1998. Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa, kaitannya dengan Pengembangan Kepulauan Karimunjawa. Lokakarya Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. Pulau Matahari, 8 – 10 Desember 1998.